

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 154 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KAJIAN SENTRALISASI PENGADAAN UNTUK PENGADAAN YANG
BERSIFAT KOMPLEKS, BESAR, DAN STRATEGIS
SEBAGAI LINGKUP KEBERHASILAN DARI
KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL – PENCEGAHAN KORUPSI (RAN-PK)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK) diperlukan membentuk tim kerja yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN SENTRALISASI PENGADAAN YANG BERSIFAT KOMPLEKS, BESAR DAN STRATEGIS SEBAGAI LINGKUP KEBERHASILAN DARI KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL – PENCEGAHAN KORUPSI (RAN-PK).

KESATU : Menetapkan Tim Kajian Sentralisasi Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK) yang terdiri atas Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK);
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK);
- d. Merumuskan konsep rekomendasi strategi dan kebijakan terkait Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK) berdasarkan hasil kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis Sebagai Lingkup Keberhasilan dari Kegiatan Rencana Aksi Nasional – Pencegahan Korupsi (RAN-PK), diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan

masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019 terhitung sejak masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KAJIAN
SENTRALISASI PENGADAAN
YANG BERSIFAT KOMPLEKS,
BESAR DAN STRATEGIS SEBAGAI
LINGKUP KEBERHASILAN DARI
KEGIATAN RENCANA AKSI
NASIONAL – PENCEGAHAN
KORUPSI (RAN-PK).

NOMOR : 154 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN SENTRALISASI PENGADAAN YANG
BERSIFAT KOMPLEKS, BESAR DAN STRATEGIS SEBAGAI LINGKUP
KEBERHASILAN DARI KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL –
PENCEGAHAN KORUPSI (RAN-PK)

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Roni Dwi Susanto	-
2	Ketua	: Salusra Widya	-
3	Anggota	: 1. Gatot Pambudhi Poetranto 2. Fadli Arif 3. Gusmelinda Rahmi 4. Emin Adhi Muhaemin 5. Yulianto Prihhandoyo 6. M. Aris Supriyanto 7. Sutan Suangkupon Lubis 8. Dwi Kartianingsih 9. Antonius Lambok Sihombing 10. Deasy Rachmawati 11. Sri Aditya Nur Pratama 12. Gigih Pribadi 13. Meylina Putri Fibisari 14. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		15. Pejabat / Staf Kementerian Keuangan	500.000
		16. Pejabat / Staf Badan Perencana Pembangunan Nasional	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO